SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT WAJIB PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PBB DI SUMATERA BARAT

Firman, Zulazhar, Erlansyah, Hasrul, dan Afrifa Khaidir

Abtrak

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan : (1) Sikap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pembayaran pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat, (2) Perilaku Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pembayaran pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat serta (3) pengaruh sikap terhadap perilaku Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembayaran pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (WPBB). Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive Cluster Random Sampling* dengan jumlah 342 orang. Pengumpulan data menggunakan kuessioner. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan prosentase dan analisis regresi. Dari analisis data ditemukan : (1) sebanyak 68,26 % WPBB mempunyai sikap positif (mendukung) terhadap pembayaran pajak. Sisanya 30,99 % mempunyai sikap negatif (kurang mendukung) serta sebanyak 0,43 % mempunyai sikap ragu-ragu. (2) sebanyak 64,28 % WPBB mempunyai perilaku positif dalam pembayaran PBB, 18,76 % mempunyai perilaku negatif dan 1 % ragu-ragu dalam pembayaran PBB. (3) Sikap memberi pengaruh terhadap perilaku WPBB dalam pembayaran pajak sebanyak 25 %.

A. Pendahuluan

Perwujudan tujuan pembangunan dan fungsi reguler negara Republik Indonesia dalam memajukan kesejahteraan rakyat, pemerintah memerlukan dana yang bersumber dari Pajak. Pajak berfungsi *budgeter* dalam arti dana masyarakat memberi kontribusi sebesar-besarnya untuk *budget* (APBN/D). Di sisi lain, belanja atau pengeluaran pemerintah berefek multiplier bagi perekonomian negara. Selanjutnya pajak berfungsi reguler dalam arti pajak adalah instrumen untuk mengatur, mendorong atau menghambat pertumbuhan pelaku-pelaku dalam bidang ekonomi tertentu. Salah satu pajak yang dimanfaatkan pemerintah untuk pemasukan keuangan negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Keberadaan pajak sama tuanya dengan umur pemerintahan yang teratur. Pajak dibayar masyarakat/rakyat kepada penguasa/raja/fiskus untuk kerajaan atau kelestarian dinasti penguasa. Sehubungan dengan hal itu, masa lalu tanah merupakan aset utama perekonomian agraris dan pendataannya relatif lebih mudah. Oleh karena itu pajak bumi/tanah merupakan jenis pajak pertama yang lahir diantara jenis pajak lainnya.

Masa kerajaan Hindu di Indonesia, pajak atas bumi/tanah bernama *Drwyahaji*. Masa kerajaan Islam bernama *pajeg*, sedangkan masa pemerintahan Rafles bernama *landrente*. Masa kolonialis Belanda bernama pajak hasil bumi dan *verponding*. Setelah kemerdekaan, Indonesia pajak bumi dihapuskan kecuali *verponding* Indonesia karena dianggap bentuk dari penjajahan kolonialis.

Setelah dekade 1960 an, dikeluarkan Undang-undang Pajak Hasil Bumi di sektor pedesaan *dalam* rangka peningkatan penerimaan pajak negara. Selanjutnya pajak hasil bumi, *Verponding* Indonesia diganti dengan pajak Iuaran Pembangunan Daerah (IPEDA). Tahun 1985 semuanya dicabut dan diganti dengan PBB. PBB (PBB) merupakan salah satu pajak pusat yang dilimpahkan ke daerah sebagai sumber dana utama pemerintah daerah. Penggunaan dana PBB hanya untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum kota. Oleh karena itu dana PBB berperan penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah.

Bedasarkan studi pendahuluan ke beberapa Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat ditemukan WPBB jumlahnya terbesar dibandingkan dengan wajib pajak jenis lainnya. Penerimaan PBB dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan peningkatan persentase kenaikan pajak lainnya. Gambaran umum, target dan realisasi penerimaan PBB di setiap Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat baik sebelum maupun setelah Reformasi dipaparkan pada tabel 1 berikut ini

Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 1996/1997 dan 1999/2000 (dalam jutaan rupiah) di Propinsi Sumatera Barat.

NO	KABUPATEN/KOTA	1996/1997		1999/2000		LP (%)	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
A	KABUPATEN						
1	Pesisir Selatan	1948	2199	2970	3015	13,12	9,28
2	S o l o k	3544	3851	3825	5406	1,98	10,09
3	Swl/Sijunjung	3317	3797	3447	5245	0,98	9,53
4	Tanah Datar	2905	3104	2361	3460	-4,68	2,87
5	Padang Pariaman	3765	3874	3959	3254	1,29	-4,00
6	A g a m	2537	2904	2805	3838	2,65	8,04
7	Lima Puluh Kota	2507	2673	2653	3991	1,46	12,33
8	Pasaman	2991	3403	4407	5918	11,84	18,48
B	K O T A						
9	P a d a n g	9153	10764	6650	7202	-6,84	-8,27
10	S o l o k	1256	1481	1150	1890	-2,11	6,90
11	Sawahlunto	2289	1662	1646	2599	-7,02	14,09
12	Padang Panjang	1343	1538	1135	1884	-3,87	5,62
13	Bukittinggi	2005	2064	1575	2123	-5,36	0,71
14	Payahkumbuh	1377	1732	1330	2017	-0,85	4,11

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 1997 dan 2000

Realisasi penerimaan PBB Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat tahun 1996/1997 lebih kurang berjumlah 45 milyar dan tahun 1999/2000 51 milyar atau meningkat rata-rata 3,77% per tahun. Realisasi penerimaan PBB pada tingkat Kabupaten/Kota yang rendah dari target adalah Kabupaten Padang Pariaman (-4%). Sedangkan realisasi penerimaan PBB untuk tingkat Kota rata-rata 3,86%. Dari rata-rata tersebut terdapat penerimaan PBB yang menurun (-8,84 %) terdapat di kota Padang.

Target penerimaan PBB di Sumatera Barat menurun apabila dibandingkan sebelum reformasi. Ini mungkin Pemda mengasumsikan bahwa masyarakat tidak mampu membayar pajak karena masa krisis. Walaupun demikian Kabupaten Padang Pariaman tetap rendah (-4%), Kota Padang menurun (-8,84%) dan Bukittinggi sebagai salah satu kota yang sedang pesat perkembangannya kurang mengalami peningkatan (0,71%). Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan cukup pesat, yaitu Kota Sawah Lunto (14,09%), Kota Solok (6,90%) dan Kabupaten Solok (10,09%).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat realisasi penerimaan pajak di Kabupaten atau Kota Sumatera Barat tidak mengalami pertumbuhan yang sama, sehingga ditemukan Kabupaten/Kota mengalami peningkatan cukup

pesat dan kurang mengalami peningkatan dibandingkan penerimaan antar Kabupaten/Kota yang ada.

Keberhasilan penerimaan pajak dipengaruhi oleh *tax law*, *tax policy*, *tax administration* dan *tax payer*. Dibandingkan dengan faktor lainnya, *tax payer* atau wajib pajak bersifat *uncontrollable* bagi fiskus. *Tax payer* (WPBB) merupakan salah faktor penentu keberhasilan penerimaan pajak yang perlu ditingkatkan kesadarannya untuk pembayaran pajak demi pemasukan keuangan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum Kabupaten/Kota. Walaupun demikian kesadaran wajib pajak tidak terlepas dengan *tax law* dan *tax policy*.

Perilaku masyarakat wajib pajak merupakan refleksi dari berbagai macam aspek fisik dan psikologis. Memotivasi seseorang menerima sesuatu yang baru bukanlah hal yang mudah karena menyangkut proses psikologis yang mereka alami dari dalam diri, tekanan anggota kelompok dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, informasi yang diterima serta penggunaan saluran informasi atau perantara dalam menyampaikan inovasi. Soekidjo Notoatmojo (1993: 101) menjelaskan perilaku timbul dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri, diantaranya: pengalaman, pengetahuan, sikap, keinginan, emosi, motivasi, persepsi dan niat. Sedangkan faktor dari luar diri yang mempengaruhi perilaku, diantaranya: Sarana, sosek/sosbud serta nilai/norma yang berlaku.

Salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi kesadaran WPBB adalah sikap. Selanjutnya Soekidjo Notoatmojo (1993: 99) menjelaskan sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behavior*). Untuk terwujudnya sikap sebagai perilaku nyata diperlukan faktor pendukung lainnya.

Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan mengungkapkan (1) sikap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pembayaran pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat, (2) Perilaku Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pembayaran pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat serta (3) pengaruh sikap terhadap perilaku Wajib Pajak Bumi dan

Bangunan dalam membayar pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat.

Pengungkapan sikap dan perilaku WPBB dalam pembayaran pajak bermanfaat dalam peningkatan pemasukan dana pembangunan guna pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum Kabupaten/Kota. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam peningkatan kesadaran WPBB bagi pemerintah beserta direktoran jenderal pajak dan pemerintah daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam setiap upaya meningkatkan penerimaan PBB.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui survey, dengan populasi WPBB yang memiliki karakteristik Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nagari/Desa/Kelurahan yang realisasi penerimaannya meningkat dan tidak meningkat dari target yang ditetapkan tiap tahun dan wajib pajak terdaftar di Kelurahan/Nagari/Desa sebagai wajib pajak. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive Cluster Random Sampling*. Kabupaten yang terpilih adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, Kota solok, dan Kota Sawahlunto. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner, data diolah dengan persentase dan analisis regresi.

C. Hasil Penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang sikap dan perilaku WPBB dalam pembayaran PBB. Data yang terkumpul diolah sesuai dengan teknik yang telah ditetapkan, hasil pengolahan data tersebut digambarkan pada uraian berikut ini:

1. Sikap WPBB terhadap Pembayaran Pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat

Sikap WPBB terhadap pembayaran pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat tergambar pada tabel 2 dan 3 berikut.

Tabel 2 : Distribusi Sikap Responden terhadap Pembayaran PBB di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat

NO	INDIKATOR	POSITIF	NEGATIF	RAGU		
		%	%	%		
1	Fungsi dan Makna PBB	75,79	23,86	0,42		
2	Aturan tentang PBB	70,47	29,20	0,22		
3	Pelayanan dalam Pemungutan PBB	77,73	21,27	0,90		
4	Organisasi Pemungut PBB	49,04	49,63	1,06		
	Total	68,26	30,99	0,43		

Dari tabel 2 di atas, diperoleh keterangan sebanyak 68,26 % WPBB mempunyai sikap positif (mendukung) terhadap pembayaran pajak. Sisanya 30,99 % mempunyai sikap negatif (kurang mendukung) serta sebanyak 0,43 % mempunyai sikap ragu-ragu. Dengan demikian WPBB di Propinsi Sumatera Barat sebanyak 31,42% cenderung memiliki sikap kurang mendukung terhadap pembayaran PBB.

Sikap negatif (kurang mendukung) WPBB terhadap pembayaran PBB tersebut bersumber dari sikap WPBB terhadap organisasi pemungut PBB sebanyak 49,63 % mempunyai sikap negatif dan 1,06 % mempunyai sikap ragu-ragu, sikap terhadap aturan tentang PBB sebanyak 29,20 % mempunyai sikap negatif dan 0,22 % mempunyai sikap ragu-ragu, sikap WPBB terhadap pelayanan pemungutan PBB sebanyak 21,27 % mempunyai sikap negatif dan 0,90 % ragu-ragu serta sikap WPBB terhadap fungsi dan makna PBB sebanyak 23,86 % mempunyai sikap negatif dan 0,42 % ragu-ragu.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, sikap negatif WPBB terhadap pembayaran pajak di Propinsi Sumatera Barat terungkap pada tabel 3 berikut ini :

Tabel3 : Distribusi Alasan Responden yang Mempunyai Sikap Negatif terhadap Pembayaran PBB di Propinsi Sumatera Barat

No.	Indikator	Alasan Kurang Mendukung	Frekuensi	Persentase
1.	Fungsi dan Makna PBB	Tidak tahu	104	28,99
		Dana PBB tidak jelas penggunaannya oleh masyarakat	193	83,44
		PBB menguntungkan orang tertentu	24	3,93
2.	Aturan tentang PBB	Tidak tahu aturan tentang PBB	125	34,72
		Aturan ditujukan untuk masyarakat biasa	44	7,50
		Penetapan Nilai jual objek PBB tidak jelas aturannya	96	19,44
		Petugas tidak menguasai peraturan	86	21,39
3.	Pelayanan dalam Pemungutan PBB	Pelayanan petugas kurang mendukung	52	14,44
		Petugas tidak memahami kondisi WPBB	67	18,61
		Petugas Berorientasi target	42	74,97
4.	Organisasi Pemungut PBB	Tidak tahu	124	29,11
		Petugas kurang menyakinkan	141	37,17
		Administrasi dan keuangan organisasi pemungut tidak jelas	154	42,78

Berdasarkan tabel di atas, terlihat sikap kurang mendukung (sikap negatif) dari wajib pajak terhadap pembayaran PBB di Sumatera Barat bersumber dari lemahnya pemahaman WPBB terhadap pemanfaatan fungsi dan makna PBB, aturan tentang PBB, serta kurang memperoleh pelayanan dalam pembayaran PBB dan organisasi pemugut PBB Kenagarian/Desa/Kelurahan dipandang kurang profesional. Secara lebih terperinci keadaan ini ditunjukkan oleh sebanyak 28,99 % WPBB tidak tahu fungsi dan makna PBB, 83,44% berpandangan dana PBB tidak jelas penggunaannya. 3,93 % menilai pemanfaatan dana PBB hanya ditujukan

untuk orang tertentu saja. Selanjutnya sebanyak 34,72 % tidak tahu aturan tentang PBB, sebanyak 7,50 % beranggapan aturan PBB hanya ditujukan untuk masyarakat biasa, 19,44 % berpandangan penetapan nilai jual objek PBB tidak jelas aturannya. Sehubungan dengan proses pelayanan yang dilakukan petugas dalam pemungutan PBB, sebanyak 14,44 % berpendapat pelayanan petugas dalam memungut pajak kurang mendukung. 74,97 % menyatakan petugas lebih mengejar target dari pada pelayanan, 18,61 % melihat petugas tidak memahami kondisi WPBB. Berikutnya tentang organisasi pemungutan PBB, 29,11 % menyatakan ketidaktahuan mereka tentang organisasi pemungutan PBB, kemudian sebanyak 37,17% berpandangan petugas yang ditunjuk organisasi kurang menyakinkan WPBB dan sebanyak 42,78 % memandang administrasi keuangan organisasi pemungut tidak jelas.

2. Perilaku WPBB dalam Pembayaran Pajak di Kabupaten /Kota Propinsi Sumatera Barat.

Perilaku WPBB dalam pembayaran pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat terlihat pada tabel 4 dan 5 berikut ini :

Distribusi 4 : Perilaku Responden Terhadap Pembayaran PBB di Propinsi Sumatera Barat

NO	INDIKATOR	POSITIF	NEGATIF	RAGU		
		%	%	%		
1	Fungsi dan Makna PBB	60,11	26,53	1,11		
2	Aturan tentang PBB	68,04	14,45	0,89		
3	Pelayanan dalam Pemungutan PBB	65,79	16,43	1,12		
4	Organisasi Pemungut PBB	63,19	17,63	0,89		
	Total	64,28	18,76	1,00		

Dari tabel 43 di atas diperoleh keterangan sebanyak 64,28 % WPBB sebagai responden membayar PBB (mempunyai perilaku positif), 18,76 % keberatan untuk membayar PBB (mempunyai perilaku negatif) dan 1 % ragu-ragu membayar PBB. Dengan demikian sebanyak 19,76 % WPBB sebagai responden mempunyai perilaku yang kurang mendukung dalam pembayaran PBB di Sumatera Barat

Keberatan WPBB dalam pembayaran pajak (perilaku negatif) bersumber dari 60,11 % tidak tahu fungsi dan makna PBB, 65,79 % mengemukakan hambatan pembayaran PBB disebabkan oleh pelayanan dalam pemungutan PBB, 63,19 % karena organisasi pemungut PBB dan 68,04% karena aturan tentang PBB yang tidak jelas.

Apabila ditelusuri lebih lanjut sumber keberatan WPBB dalam pembayaran pajak di Propinsi Sumatera Barat terlihat pada tabel 38 berikut ini :

Tabel 4 : Perilaku WPBB yang Kurang Mendukung terhadap Pembayaran PBB di Daerah Propinsi Sumatera Barat

NO	INDIKATOR	PERILAKU	F	%
1	Fungsi dan makna PBB	Tidak tahu	61	27,11
		Petugas tidak memahami makna dan fungsi PBB	56	15,55
2	Aturan tentang PBB	Tidak tahu	43	11,94
		Petugas tidak menguasai peraturan	34	9,39
		Meragukan aturan/cara penghitungan penetapan pajak	77	21,35
3	Pelayanan dalam pemungutan	Waktu pemungutan kurang tepat	61	16,91
		Petugas kurang simpatik	44	12,22
4	Organisasi pemungut PBB	Tidak tahu	85	23,55
		Organisasi kurang profesional Petugas tidak disiplin	103	28,50

Dari tabel di atas dapat dikemukakan, ada beberapa perilaku dari petugas yang kurang mendukung terhadap pembayaran PBB, yakni sekitar 27,11 % petugas sama sekali tidak tahu fungsi dan makna PBB, sebanyak 15,55 % tidak memahami makna dan fungsi PBB. Sebanyak 11,94% petugas tidak tahu tentang aturan PBB, demikian juga sebanyak 9,39 % petugas tahu tapi tidak menguasai aturan PBB, dan sebanyak 21,35% WPBB cara penghitungan penetapan pajak yang dibuat oleh petugas. Kemudian sebanyak 16,91 % wajib pajak juga menilai waktu pemungutan dilakukan petugas kurang tepat, dan 12,22 % menilai dalam memungut petugas tidak simpatik. Wajib pajak juga tidak tahu tentang organisasi pemungut pajak, yakni sebanyak 23,55 %. Sebanyak 28,50 %

menilai organisasi kurang profesional dan 16,66 % memandang petugas tidak disiplin

D. Pembahasan

Berdasarkan penelitian ditemukan sikap wajib pajak terhadap pembayaran PBB di Kabupaten /Kota Propinsi Sumatera Barat belum optimal. Hal ini ditandai oleh sebanyak 31,42 % wajib pajak cenderung memiliki sikap negatif terhadap pembayaran PBB, disebabkan lemahnya pengenalan dan pemahaman WPBB terhadap fungsi dan makna PBB, aturan tentang PBB, serta kurang memperoleh pelayanan dan organisasi pemungut PBB di Kenagarian/Desa/Kelurahan dipandang kurang profesional.

Pengenalan dan pemahaman wajib pajak terhadap PBB ditentukan oleh proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPBB, Dispenda dan petugas pemungut pajak, Kepala Desa/Wali Nagari/Lurah beserta perangkatnya. Berdasarkan penelitian terungkap petugas pemungut pajak di Kelurahan/Desa/Nagari sebagian besar belum pernah melakukan sosialisasi dan mendapatkan pembekalan tentang PBB. Bekal petugas sebagai kolektor hanya ilmu yang sebagian besar berpendidikan SLTP dan SLTA (SLTP : 50 % dan SLTA 33 %). Kondisi ini menuntut lebih lanjut peningkatan kemampuan petugas pemungut pajak di Kelurahan/Desa/Nagar tentang PBB.

Selanjutnya kebijakan Bupati/Walikota tentang PBB sebagian besar berorientasi peningkatan realisasi penerimaan. Peningkatan kesadaran melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang PBB oleh petugas yang ada di Kelurahan/Nagari/Desa terhadap WPBB terasa lemah. Kebutuhan WPBB dan petugas dalam pengumpulan dana PBB terlihat bertolak belakang. WPBB mengharapkan paham serta jelas manfaat dan penggunaannya dana PBB, sedangkan petugas dikejar oleh target yang telah digariskan dari pemerintahan Kabupaten/Kota.

Kebijakan yang diambil masing-masing Kabupaten/Kota tentang organisasi pemungut PBB berbeda-beda. Apabila dicermati berbagai keputusan Walikota/Bupati tersebut di atas, terlihat sebagian besar organisasi pemungut PBB di Kelurahan/Desa/Wali Nagari kurang tersentuh. Sedangkan dalam pelaksanaan pemungutan PBB, petugas di Kelurahan/Nagari/Desalah sebagai ujung tombak dalam penerimaan PBB. Kebijakan tersebut berakibat dengan kurangnya pembinaan terhadap petugas/kolektor pemungut pajak yang ada di Kelurahan/Desa/Nagari. WPBB berpandangan organisasi dan petugas pemungut pajak yang ada di

Kelurahan/Nagari/Desa kurang profesional dan tugas sebagai kolektor PBB hanya sebagai tugas sampingan oleh sebagian besar petugas sebagai Staf Desa. Tidak jarang kewajiban membayar PBB dikaitkan dengan urusan lain di Kelurahan/Desa/Nagari.

Di samping itu, permasalahan organisasi pemungut PBB di Kabupaten berkaitan dengan proses transisi antara pemerintahan Desa ke Nagari. Sebagian Kepala Desa merasa kehilangan pekerjaan dan tidak sepenuhnya merasa bertanggungjawab dan proaktif dalam rangka memungut PBB. Wali Nagari/Lurah/Kepala Desa beserta perangkatnya kurang berkoordinasi dengan Dipenda/Kapenda dalam menyempurnakan data-data yang diperlukan dalam pemungutan PBB.

Sikap WPBB berpengaruh terhadap perilaku dalam pembayaran pajak. Perilaku WPBB di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat ditemukan belum optimal mendukung membayar PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 35,72 % WPBB mempunyai perilaku yang kurang mendukung dalam pembayaran PBB di Sumatera Barat. Keberatan WPBB dalam pembayaran pajak (perilaku negatif) disebabkan oleh petugas dan WPBB tidak tahu fungsi dan makna PBB, aturan PBB, WPBB meragukan cara penghitungan penetapan pajak yang dibuat oleh petugas, waktu pemungutan dilakukan petugas kurang tepat, dalam memungut petugas tidak simpatik, wajib pajak juga tidak tahu tentang organisasi pemungut pajak.

Keberatan sebagian WPBB membayar PBB dengan sadar disebabkan oleh lemahnya pemahaman petugas tentang PBB. Kelemahan petugas menyebabkan WPBB sangsi dengan penghitungan nilai jual objek pajak sebagai dasar dalam penetapan jumlah yang harus mereka bayar. Di samping itu WPBB tidak tahu manfaat dan penggunaan dana yang telah dikumpulkan melalui PBB, karena pelaksanaan pembangunan yang ada tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

Pendekatan budaya dengan memanfaatkan Alim Ulama dan Niniak Mamak jarang sekali dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran

penerimaan PBB. WPBB jarang sekali diikutsertakan di tingkat Nagari/Desa/Kelurahan untuk merencanakan penggunaan dana PBB dalam pembangunan.

Insentif bagi petugas di Nagari/Desa/Kelurahan yang memenuhi target dan WPBB yang telah membayar tepat pada waktunya tidak pernah ada. WPBB yang tidak membayar sesuai dengan ketentuan yang ada tidak pernah mendapat sanksi. Akhirnya sebagian WPBB beranggapan membayar PBB apabila telah diminta oleh petugas ke rumah-rumah atau berurusan di Kantor Wali Nagari/Desa/Kelurahan.

E. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pengolahan data dapat disimpulkan temuan penelitian sebagai berikut :

1. Sikap WPBB terhadap Pembayaran Pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat belum optimal. Hal ini ditandai oleh sepertiga wajib pajak memiliki sikap negatif terhadap pembayaran PBB. Sikap negatif sebagian WPBB disebabkan, antara lain: Kurang mengenal dan memahami fungsi/makna, aturan tentang PBB, serta pelayanan dan organisasi pemungut PBB di Kenagarian/Desa/Kelurahan dipandang kurang profesional. Sosialisasi PBB terhadap WPBB oleh Kolektor di Kelurahan/Nagari/Desa terasa lemah. Kebijakan yang diambil Bupati/Walikota serta Camat sebagian besar lebih berorientasi pada peningkatan realisasi penerimaan, bukan peningkatan kesadaran WPBB. Organisasi pemungut pajak di Nagari/Desa/Kelurahan kurang tersentuh dengan kebijakan yang ada.
2. Perilaku WPBB dalam pembayaran pajak di Kabupaten /Kota Propinsi Sumatera Barat belum optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan lebih dari sepertiga WPBB berperilaku kurang mendukung dalam pembayaran PBB di Sumatera Barat, yang disebabkan

antara lain: petugas dan WPBB tidak tahu fungsi/makna dan aturan tentang PBB, meragukan cara penghitungan penetapan pajak yang dibuat oleh petugas, waktu pemungutan dilakukan petugas kurang tepat, dalam memungut petugas tidak simpatik serta wajib pajak juga tidak tahu tentang organisasi pemungut pajak. Kebutuhan WPBB dan petugas dalam pengumpulan dana PBB terlihat bertolak belakang. WPBB mengharapkan paham serta jelas manfaat dan penggunaan dana PBB, sedangkan petugas lebih berorientasi mengejar target yang telah digariskan.

3. Kepuasan Wajib Pajak Bumi Bangunan atas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak di Kelurahan/Nagari/Desa Propinsi Sumatera Barat belum optimal. Hal ini ditunjukkan lebih dari sepertiga WPBB belum menerima pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Ketidakpuasan WPBB atas pelayanan petugas disebabkan oleh petugas tidak memberikan pelayanan sosialisasi tentang PBB dan hubungan antara petugas dengan wajib pajak dalam pengumpulan dana kurang mendukung.

F. Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sikap WPBB terhadap pembayaran PBB di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat belum optimal mendukung pencapaian target realisasi penerimaan. Untuk itu diperlukan KPPBB bekoordinasi dengan Pemerintah Propinsi (Dispenda) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dispenda/Kapenda/BKUD) untuk mengoptimalkan program sosialisasi PBB yang dapat meningkatkan sikap WPBB terhadap pembayaran PBB dengan cara : Sosialisasi tentang pengenalan dan pemahaman fungsi/makna, peraturan, pelayanan dan organisasi pemungut PBB, melalui liflet/brosur, buku panduan, serta media masa cetak dan elektronik.
2. Pengenalan dan pemahaman kolektor terhadap PBB di Kelurahan/Nagari/Desa masih lemah. Oleh karena itu diperlukan KPPBB berkoordinasi dengan Pemerintahan Propinsi (Dispenda), Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengenalan dan pemahaman Kolektor di Kelurahan/Nagari/Desa dalam pemungutan PBB.
3. Kebijakan yang diambil Bupati/Walikota serta Camat sebagian besar berorientasi terhadap peningkatan realisasi penerimaan bukan peningkatan

- kesadaran. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB berasal dari Kelurahan/Nagari/Desa.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota diperlukan melakukan pembenahan organisasi pemungut Organisasi pemungut pajak di Nagari/Desa/Kelurahan kurang tersentuh. pajak di Kelurahan/Nagari/Desa sebagai ujung tombok pemungutan PBB, berupa manajemen, penyediaan sarana/prasarana serta peningkatan isentif.
 5. Koordinasi antar KPBB, Dispenda/Dipenda/Kapenda/Dinas serta Nagari/Desa/Kelurahan dalam melengkapi segala data yang diperlukan untuk penetapan PBB terasa lemah. Untuk itu diperlukan peningkatan koordinasi dalam pengadaan Data Base PBB di setiap daerah sebagai dasar penetapan jumlah PBB yang dibayar oleh WPBB.
 6. Pemanfaatkan lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kenagarian/Desa/Kelurahan terasa belum optimal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB. Diperlukan program pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kenagarian/Desa/Kelurahan, oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui rapat/pertemuan dalam merencanakan penerimaan dan penggunaan dana PBB untuk pembangunan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmas, Jamaluddin. (1990) : Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat-Daerah di Indonesia : Kasus D.I.Aceh, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Ancok, Djamaludin (1992) : Teknik Penyusunan Skala Pengukuran. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Atkinson, Rita L (!987) : Pengantar Psikologi . Bandung : Interaksara

Azwar, Saifuddin (1986) : Reliabilitas dan Validitas : Interpretasi dan Komputasi. Yogyakarta : Liberty.

_____ (1988) : Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta : Liberty.

Badan Pengawas Keuangan (Bapeka), Panitia Kerja Penyusunan Pedoman dan Program Audit Standar Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 1991. Petunjuk Pemerinaan Atas Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta : Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi Sub Tim Pnyempurnaan Auditing Pemerintah I (Bepeka).

Baridwan, Zaki (1992) : Peranan Penelitian dalam Pengembangan Profesi dan Disiplin Akuntansi Memasuki Abad 21. Yogyakarta : Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi Ke 2, Ikatan Akuntan Indonesia.

Cartwright, Dorwin, Alvin Zander (1968) : Group Dynamics. London : Harper & Row. Publishers

Edwards, Allen (1957) : Techniques of Attitude Scale Construction. Bombay : Vakils,Feffer And Simons Private.LTD.

Fisher,B.Aubrey dan Donald G.Ellis (1990) : Small Group Decision Making. New York : Mc Graw Hill Publishing Company.

Gerungan. (1986) Psikologi Sosial . Bandung : Eresco.

Lasmana, Eko (1989) : Pengantar Perpajakan Indoensia. Jakarta : Badan Penerbitan Universitas Tarumanagara.

Katz,Daniel dan Robert L.Kahn (1978): The Social Psychology of Organization. New York : John Wiley & Sons

Krech,David, Richard S.Crutchfield .(1975): Theory and Problem of Social Psychology. New Delhi : McGraw-Hill Publishing Copany LTD.

Koeswara,E (1988) : Agresi Manusia. Bandung : PT.Eresco.

Mangkoeseobroto, Guritno (1992) : Pointers : Tantangan dan Prospek Pengumpulan pajak sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan, dalam Seminar Sehari Tantangan dan Prospek Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam dalam PJPT II. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Munawir, S (1992) : Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Liberty.

Mueller,Daniel J.(1986) Measuring Social Attitue. London : Teachers College Columbia University.

Marat (1981) : Sikap Manusia Perubahan serta Pengukuran. Bandung :Chalia Indonesia.

Mabery, Edward A, Richard E.Barnes (1980): The Dynamics Of Small Group Comunication.London : Prentice-Hall International.

Republik Indonesia (1994) : Undang-ndang No.12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No.12 tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta : Sekretariat Negara RI.

Rakhmat, Jalaluddin (1988) : Psikologi Komunikasi. Bandung: Remadja Karya
Sadjuli, Suroso Imam (1995) Dinamika Ekonomi Indonesia dari Masa Ke Masa.
Surabaya : Universitas Airlangga .

Shaw, Marvin E. dan Philip R. Costanzo (1982) : Theories of Social Psychology.
London : Mc.Graw-Hill International Book Company.

Sampson, Edward G. (1976) : Social Psychology And Contemporary Social. New
York : John Wiley & Sons Inc.

Saaban, R (1988) : Pajak Bumi di Indonesia , dari Masa Ke Masa : Sejarah Lahir
dan Perkembangannya. Jakarta : Penerbit Yayasan Bina Artha.

Subekti, R. Tobias (1985) : Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta : Karunia Universitas
terbuka.

Usman, B dan K. Subroto (1980) : Pajak-pajak Indonesia. Jakarta : Yayasan Bina
Pajak.

Turner, Jonathan H (1988): A Theory of Social Interaction. California : Stanford
University Press.

Waseso, Mulyadi Guntur, (1986): Dimensi-dimensi Psikologi Sosial. Yogyakarta
: PT. Hanindita.

Yukl, Gary (1981): Leadership in Organizations. New York : Prentice Hall
International, Inc

Zandjani, Tubagus Chairul Amachi (1992) : Perpajakan. Jakarta : PAU-EK-UI
denga Penerbit PT. Gramedia Utama.

Bio Data

Firman, Lahir 25 Februari 1961. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada
Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP IKIP Padang tahun 1985. Gelar Magister
Sains (S2) dalam bidang psikologi dengan kajian utama Psikologi Sosial pada
Program Pascasarjana Univ. Padjadjaran Bandung. Gelar Doktor (S3) Program
Studi Ilmu-ilmu sosial pada Program Pascasarjana Univ. Airlangga Surabaya.
Sekarang bekerja sebagai dosen jurusan bimbingan dan konseling FIP UNP,
Program Pascasarjana UNP serta Kepala Bidang Kemasyarakatan Balitbang
Propinsi Sumatera Barat